

# **DUA MUKA** **KEBIJAKAN** **PENDIDIKAN INDONESIA**



# **DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA**



**DOMPET  
DHUafa**  
MAKAMAL PENDIDIKAN



# Dua Muka

## Kebijakan Pendidikan Indonesia



# **Dua Muka Kebijakan Pendidikan Indonesia**

©DD, 2013

ISBN: 978-602-7807-14-3

## **Penulis**

Tim Peneliti Makmal Pendidikan

## **Penyunting**

Yusuf Maulana

## **Pemeriksa Aksara**

Ab Rihab

## **Penata Letak & Perwajahan Sampul**

Turiyanto

Foto-foto dalam buku ini dokumentasi program Makmal Pendidikan, kecuali yang disebutkan khusus dengan pencantuman sumber asal.

Hak Cipta dilindungi undang-undang

All Rights reserve

Cetakan I, Mei 2013

## **Diterbitkan oleh**

Dompot Dhuafa Makmal Pendidikan

Jl. Raya Parung Km. 42 Ds. Jampang Kec. Kemang

Kab. Bogor, Jawa Barat 16310

Telp. (0251) 8610817, 8610818, 8612044

Faks. (0251) 8615016

Website: [www.makmalpendidikan.net](http://www.makmalpendidikan.net)

E-mail: [marcomm@makmalpendidikan.net](mailto:marcomm@makmalpendidikan.net)



## DAFTAR ISI

Pengantar Direktur Makmal Pendidikan .....	vi
Elegi Kebijakan Pendidikan Indonesia .....	1
Kebijakan Peduli Pendidikan .....	6
Ironi Pemerataan Pendidikan.....	13
Beranda yang Tidak Terawat.....	20
Indonesia Timur juga Indonesia .....	25
Wajah Ketidakadilan Kian Tampak.....	31
Kebijakan yang Mengusik Keadilan.....	35
Kebijakan yang Berkeadilan .....	43
Penutup .....	50
Sumber Acuan .....	52
Profil Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa .....	56



## PENGANTAR

### DIREKTUR MAKMAL PENDIDIKAN

**B**ANGSA INDONESIA telah melewati 68 tahun kemerdekaan, namun problematika pendidikan yang dihadapi bangsa ini tak urung usai. Di antaranya adalah ketidakmerataan akses, infrastruktur, dan kualitas pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Budaya sebagai pengelola tidak menutup mata akan permasalahan tersebut.

Permasalahan ini dijawab oleh Kemendikbud melalui visinya, yakni terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan nasional untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan berkarakter kuat. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang dijalankan Kemendikbud adalah meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan; memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan; meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan; mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan; menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan; melestarikan dan memperkuat bahasa dan kebudayaan Indonesia.

Buku Dua Muka Kebijakan Pendidikan Indonesia banyak mengungkapkan tidak sejalanannya antara strategi capaian visi Kemendikbud dengan fakta di lapangan. Salah



## PENGANTAR DIREKTUR MAKMAL PENDIDIKAN

satu yang diungkapkan adalah akses pendidikan Indonesia yang masih jauh dari jangkauan. Masih banyak anak Indonesia yang harus berjuang untuk dapat bersekolah; mulai dari meniti jembatan rusak, menghadapi arus deras sungai, bahkan berjalan kaki hingga berkilo-kilo meter. Kondisi ini sangat berbeda dengan anak-anak Indonesia yang berada di kota-kota besar, begitu mudahnya akses untuk bersekolah bahkan kendaraan mewah berseliweran untuk mengantar dan menjemput siswa.

Selain akses, kualitas pendidikan di Indonesia pun masih terdapat kesenjangan yang lebar. Buku ini mengungkapkan dengan menggunakan Rasio Gini untuk melihat kesenjangan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Misalnya pada bulan Februari 2012, diketahui bahwa 55,51% tenaga kerja Indonesia maksimal hanya tamat SD, sedangkan yang tamatan SMA hanya 17,2%. Data Badan Pusat Statistik mengenai indikator pendidikan, baik Angka Partisipasi Sekolah maupun Angka Buta Huruf, juga memperlihatkan fakta bahwa kesenjangan pendidikan itu jelas terjadi. Melihat peta sebaran siswa berprestasi juga menunjukkan perbedaan kualitas pendidikan yang cukup mencolok. Ketimpangan ini nyata terlihat antara data pendidikan di provinsi DKI Jakarta dengan Papua, atau antara potret pendidikan di Pulau Jawa dengan di Nusa Tenggara, atau antara kualitas pendidikan di daerah pusat kota dengan kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Selain memaparkan bagaimana kesenjangan pendidikan Indonesia, buku ini menawarkan solusi menuju pendidikan Indonesia yang berkeadilan. Semoga hadirnya ulas-



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

an seputar kebijakan dua muka dalam dunia pendidikan kita mampu memberikan inspirasi bagi siapa pun untuk sama-sama ikut terlibat dalam proses jalannya pendidikan di Indonesia. Di samping itu, tidak sekadar kritik, inspirasi yang hadir diharapkan mampu menghasilkan solusi dan perbaikan.

Selamat membaca, salam pendidikan!

Bogor, 8 Mei 2013

Rina Fatimah  
Direktur Makmal Pendidikan





## ELEGI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

**K**ABUPATEN KAPUAS HULU adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Badau, Empana, dan Puring Kencana. Hanya ada satu SMA dari tiga kecamatan perbatasan ini yaitu di Badau. Kesenjangan dan gejolak sosial nyata terjadi, kesejahteraan guru di Indonesia dan Malaysia sangat timpang. Kesempatan sertifikasi hanya dijatah 20% dari jumlah guru sehingga



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

tunjangan profesi tidak merata. Fasilitas sekolah dan buku sangat minim, bahkan ada sekolah yang harus meminta listrik dari Malaysia.<sup>1</sup>

Sementara itu, sekitar 30% anak usia sekolah di Kecamatan Puring Kencana memilih bersekolah di Malaysia. Persentase ini tentu akan semakin besar di desa paling ujung Indonesia yang bahkan warganya menolak untuk didata. Di negeri jiran, jika ada tiga anak dalam satu keluarga, semuanya diberi beasiswa dan satu di antaranya mendapat laptop satu unit. Mereka tinggal di asrama dengan fasilitas serba gratis, termasuk makan siang bagi orangtua yang berkunjung. Lain halnya dengan sekolah perbatasan yang masuk wilayah Indonesia, fasilitas sekolah terbatas, guru pergi bisa sampai berbulan-bulan, bantuan alat dari pemerintah sudah rusak sebelum dipakai, buku paket belum dipakai sudah berganti kurikulum, dan teknologi informasi sangat jauh tertinggal.<sup>2</sup>

Potret dunia pendidikan di dalam negeri itu menjelaskan bahwa pemenuhan salah satu aspek hak asasi manusia belumlah merata. Setiap anak bangsa di negeri ini berhak untuk memperoleh pendidikan. Hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan sudah tertuang dalam The Universal Declaration of Human Rights, *“Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stage. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and high education shall be equally accessible to all on*

---

1 Kompas, 25 November 2011.

2 The Jakarta Post, 22 Februari 2012.



*the basis of merit.*” Kemudian dalam UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” (Pasal 31 ayat 1), dan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Pasal 28C ayat 1 Amandemen Kedua UUD 1945).

Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) selain mengamanatkan 20% anggaran untuk pendidikan<sup>3</sup> juga menegaskan dalam pasal 5 bahwa: (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu; (2) warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; (3) warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; (4) warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; (5) setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

---

3 UU Sisdiknas Pasal 49 ayat (1) berbunyi, “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

Dalam bagian penjelasan UU Sisdiknas juga termuat visi dan misi pendidikan nasional yang merupakan bagian dari strategi pembaruan sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Visi dan misi pendidikan nasional ini kemudian menjwai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



## ELEGI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

an (Kemendikbud) Republik Indonesia. Visi Kemendikbud adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan nasional untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan berkarakter kuat. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang dijalankan Kemendikbud adalah meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan; memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan; meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan; mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan; menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan; melestarikan dan memperkuat Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.

Berkaca pada visi dan misi pendidikan nasional dan Kemendikbud, menjadi sebuah tanda tanya besar melihat masih adanya kejadian seperti di Kapuas Hulu. Tidak hanya di Kapuas Hulu, di banyak tempat yang bahkan dekat dengan Ibu Kota negeri ini pun masih dijumpai potret buram pelaksanaan pendidikan.





## KEBIJAKAN PEDULI PENDIDIKAN

**S**ECARA KONSTITUSIONAL, pendidikan bangsa Indonesia sudah terbilang ‘aman’. Tidak ada satu pun dasar hukum yang mengerdilkan pentingnya pendidikan dan hendak menghambat berkembangnya pendidikan di Indonesia. Lahirnya UU Sisdiknas memberi ruang yang luar biasa bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Bagaimana tidak, tuntutan konstitusi untuk mengalokasikan 20% APBN/APBD<sup>4</sup> untuk pendidikan jelas memberi harapan akan hadirnya kualitas pendidikan Indonesia yang

- 
- 4 Dalam amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat (4) tercantum, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”



## KEBIJAKAN PEDULI PENDIDIKAN

lebih baik. Berbagai program pendidikan pun digulirkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Pendidikan juga menjadi salah satu dari sebelas prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Alokasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 336,8 triliun rupiah untuk tahun 2013 jelas bukan jumlah kecil. Dalam RKP juga dijelaskan bahwa tujuan dan visi pembangunan pendidikan adalah menuntaskan program wajib belajar (wajar) pendidikan dasar sembilan tahun bagi sekitar 45 juta siswa SD dan SMP, meningkatkan kualitas pendidikan, serta jaminan atas keberlangsungan program pendidikan bagi generasi selanjutnya. Oleh karena itu, dalam rincian RAPBN 2013 pemerintah telah mengalokasikan anggaran tersebut di antaranya ke dalam sasaran pembangunan berikut ini:

- mengalokasikan dana sebesar Rp 162 miliar untuk membangun teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran berbasis elektronik (*E-Learning*) di 23 ribu sekolah di seluruh provinsi di Indonesia;
- melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 54,6 juta siswa, masing-masing 45 juta siswa setingkat SD/MI/Salafiyah Ula dan SMP/MTs/Salafiyah Wustha, serta untuk 9,6 juta siswa SMA/SMK/MA; dana yang dialokasikan sekitar 23,4 triliun rupiah;
- melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekitar 14,3 juta siswa/mahasiswa, dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekitar 220 ribu siswa/mahasiswa;



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

- memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang diharapkan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang menengah, memperkecil disparitas antardaerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan vokasi;
- pembangunan 216 Unit Sekolah Baru (USB), dan lebih dari 4.500 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SMLB, serta memulai rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas SMA/SMK yang rusak berat, dan sebanyak 30.350 ruang kelas SD/SMP yang rusak sedang;
- melanjutkan pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 guru di sekolah/madrasah; pelaksanaan sertifikasi akan didahului dengan Uji Kompetensi Guru yang belum bersertifikasi, untuk memastikan bahwa mereka adalah guru dengan kompetensi profesional dan pedagogik yang memadai; juga disediakan Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar 43,1 triliun rupiah dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Program pro pendidikan buah kebijakan pemerintah memang lebih banyak berupa bantuan langsung yang bersifat *hit and run* dan tidak menjamin adanya kontinuitas. Sebagai contoh, bantuan operasional pendidikan baik ke sekolah maupun ke murid, program Ruang Kelas Baru (RKB), dan berbagai beasiswa mulai dari jutaan siswa SD hingga puluhan ribu mahasiswa perguruan tinggi. Di sisi lain, sebagian program sudah berorientasi jangka panjang, misalnya pembangunan teknologi informasi.



## KEBIJAKAN PEDULI PENDIDIKAN

Banyak program pendidikan yang digulirkan pemerintah masih mengedepankan besaran kuantitas sebagai ukuran keberhasilan, misalnya banyaknya siswa dan mahasiswa yang memperoleh beasiswa, banyaknya sekolah yang mendapat bantuan operasional, atau banyaknya guru yang memperoleh tunjangan profesi. Terlepas dari evaluasi akan kualitas, semua program pendidikan tersebut tetaplah membantu dan memberi sumbangsih bagi kemajuan pendidikan masyarakat.

Untuk tenaga kependidikan, kesejahteraan guru juga mendapat angin segar dengan adanya tunjangan sertifikasi sehingga mengesankan bukan zamannya lagi ada “Guru Oemar Bakri”, pendidik yang gajinya jauh dari mencukupi. Sebagian besar anggaran pendidikan memang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan SDM.<sup>5</sup> Berbagai pelatihan tenaga kependidikan digelar, profesi guru pun kian diminati. Pendidikan karakter dan pembelajaran tematik diperkenalkan. Perubahan kurikulum pun dilakukan dengan membawa semangat perbaikan pendidikan.

Beberapa tahun terakhir, geliat kepedulian untuk memperbaiki pendidikan juga merambah ke masyarakat yang lebih luas. Berbagai yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga filantropi lainnya kian menaruh perhatian pada pemberdayaan pendidikan yang sifatnya

---

5 Data diperoleh dari laporan Tinjauan Belanja Publik Sektor Pendidikan (*Education Public Expenditure Review*) yang dilansir *World Bank*. Anggaran pendidikan akan dibahas lebih detail dalam edisi lengkap Laporan dan Analisis Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa tentang Dunia Pendidikan Indonesia Mutakhir.



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA



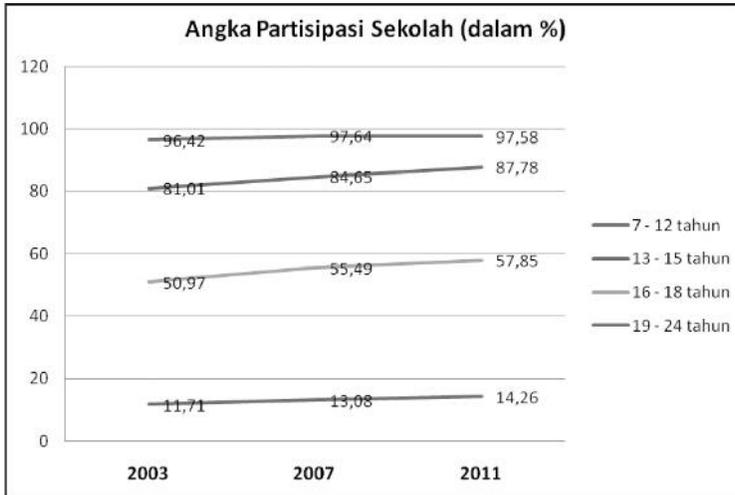
lebih strategis karena pendidikan merupakan investasi masa depan. Berbagai organisasi dan gerakan di bidang pendidikan bermunculan. Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) juga mulai menggeser fokus mereka dari pemberian yang sifatnya bantuan langsung (*charity*) terkait kesejahteraan masyarakat menjadi pemberdayaan yang sifatnya lebih *sustainable* dalam bentuk investasi sumber daya manusia.

Hasil program pendidikan juga dapat dilihat dari meningkatnya angka melek huruf di Indonesia. Saat Republik Indonesia berdiri, angka buta huruf masih di kisaran 95%. Lima belas tahun kemudian, pada tahun 1960, angka tersebut 'tinggal' menyisakan sekitar 40% orang dewasa yang buta huruf. Setelah 66 tahun merdeka, angka buta huruf tersebut dapat ditekan hingga di bawah 8%. Persentase buta huruf penduduk Indonesia tahun 2011 dengan usia



## KEBIJAKAN PEDULI PENDIDIKAN

di atas 15 tahun 'hanya' 7,19%.<sup>6</sup> Mengingat sebagian besar penduduk buta huruf adalah mereka yang berusia di atas 45 tahun, dapat dikatakan bahwa capaian pemberantasan buta huruf ini diprediksi akan terus membaik setiap tahunnya.



Sumber: diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2003-2011.

Selain angka melek huruf, angka partisipasi pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun juga mengalami tren peningkatan seperti terlihat pada grafik di atas. Peningkatan angka partisipasi ini secara umum terjadi di semua

6 Data diambil dari laporan Badan Pusat Statistik tahun 2012. Angka buta huruf akan dibahas lebih detail dalam edisi lengkap Laporan dan Analisis Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa tentang Dunia Pendidikan Indonesia Mutakhir.



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

kelompok umur dan di semua jenjang pendidikan.<sup>7</sup> Walaupun angka partisipasi pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi masih terbilang rendah, namun data tersebut juga menunjukkan tren positif peningkatan dari jenjang pendidikan ini.

---

7 Data diolah dari Susenas BPS tahun 2003-2011. Angka Partisipasi Pendidikan akan dibahas lebih detail dalam edisi lengkap Laporan dan Analisis Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa tentang Dunia Pendidikan Indonesia Mutakhir.





Foto: <http://www.thesun.co.uk/>

## IRONI PEMERATAAN PENDIDIKAN

**“IS THIS THE MOST DANGEROUS SCHOOL** *run in the world?*” Demikian judul berita di salah satu surat kabar Inggris terkemuka dengan menampilkan foto perjuangan siswa meniti jembatan rusak di Padang Pariaman, Sumatera Barat, untuk dapat bersekolah.<sup>8</sup> Bukan kali pertama beratnya perjalanan para pelajar Indonesia untuk bersekolah menjadi keprihatinan media mancanegara. Pada awal 2012, surat kabar *Daily Mail* bahkan menyamakan aksi

8 *The Sun*, 22 April 2013.



beberapa pelajar SD dan SMP di kampung Sanghiang Tanjung, Lebak, Banten yang menyeberangi jembatan rusak Sungai Ciberang dengan salah satu adegan di film *Indiana Jones*.

Kita mungkin mengelus dada sekaligus malu melihat keseharian di dalam negeri dijadikan objek pembicaraan di luar sana. Akan tetapi, itu merupakan konsekuensi atas tidak meratanya akses, infrastruktur, dan kualitas pendidikan kita. Semua persoalan ini memang menjadi pekerjaan pendidikan yang tak kunjung usai. Depdikbud melaporkan bahwa setiap menit ada empat anak yang putus sekolah.<sup>9</sup> Sebanyak 13,19% bangunan sekolah juga dalam kondisi perlu diperbaiki.<sup>10</sup> Ketika sekolah-sekolah di kota besar penuh dengan kendaraan mewah untuk mengantar dan menjemput siswa, sebagian siswa di Indonesia masih harus berjuang untuk dapat bersekolah. Meniti jembatan rusak, menghadapi arus deras sungai, ataupun berjalan berkilo-kilo meter sudah menjadi keseharian sebagian pelajar di tanah air. Kegigihan anak bangsa dalam menuntut ilmu ini seharusnya diapresiasi dengan menyediakan infrastruktur yang mendukung. Tidak cukup dengan ungkapan keprihatinan, apalagi menutup-nutupi permasalahan.

---

9 Laporan Depdikbud 2013. Angka Putus Sekolah akan dibahas lebih detail dalam edisi lengkap Laporan dan Analisis Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa tentang Dunia Pendidikan Indonesia Mutakhir.

10 Data Kemendikbud 2010. Sekolah rusak akan dibahas lebih detail dalam edisi lengkap Laporan dan Analisis Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa tentang Dunia Pendidikan Indonesia Mutakhir.



## IRONI PEMERATAAN PENDIDIKAN

Selain akses dan infrastruktur pendidikan, kualitas pendidikan Indonesia juga butuh pembenahan serius. Data BPS memang menunjukkan bahwa Indikator Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia mengalami tren positif dari tahun ke tahun, namun faktanya angka Human Development Index (HDI)<sup>11</sup> Indonesia cenderung stagnan dan masih jauh dari membanggakan. Posisi Indonesia sampai dengan Maret 2013 berada di peringkat 121 dari 186 negara. Menurut Education for All Global Monitoring Report 2012 yang dikeluarkan oleh UNESCO (berisi hasil pemantauan pendidikan dunia dari 127 negara), Education Development Index (EDI)<sup>12</sup> Indonesia berada pada posisi ke-65. Dalam kancah global, perbaikan pendidikan dengan merangkak tentunya tidak cukup untuk bersaing dengan peningkatan performa pendidikan negara lain yang berlari.

Akhir Februari 2013, dalam program “101 East” yang berjudul “Educating Indonesia”, salah satu stasiun TV berita internasional dari Qatar meliput mengenai buruknya pendidikan di Indonesia, bahkan mengungkapkan bahwa pendidikan Indonesia seperti zaman batu di era globalisasi! Liputan tersebut menindaklanjuti survei Pearson<sup>13</sup>,

---

11 Laporan pencapaian HDI diterbitkan oleh UNDP dengan indikator kesehatan dan usia hidup, tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat serta rasio bersekolah, dan standar hidup ekonomi masyarakat.

12 Education Development Index memuat empat indikator, yaitu: universal primary education, adult literacy rate, quality of Education, dan gender-related EFA (Education for All).

13 Survei Pearson 2012 menggunakan data pendidikan yang telah dirilis oleh lembaga lain, seperti data PISA tahun 2009, TIMSS



sebuah lembaga survei pemeringkat pendidikan di dunia, yang pada November 2012 menempatkan Indonesia di peringkat terbawah bersama Meksiko dan Brasil. Hasil kajian Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2012 juga menempatkan kemampuan siswa kelas VIII di Indonesia urutan ke-38 dari 42 negara untuk bidang matematika, dan urutan ke-40 dari 42 negara untuk bidang sains. Dalih pemerintah dengan menggunakan fakta bahwa setiap tahunnya banyak siswa Indonesia yang memperoleh medali dalam olimpiade internasional justru semakin menunjukkan tidak meratanya prestasi siswa di Indonesia, betapapun secara potensi kecerdasan mereka sebenarnya tidak kalah dari siswa negara lain.

Tidak hanya kualitas peserta didik, liputan tersebut juga menyoroti kualitas pendidik dengan menyebutkan, *"Only 51% of Indonesian teacher have the right qualifications to teach."* Hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) dan Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2012 ternyata mengungkapkan data yang lebih memprihatinkan. Berdasarkan data hasil UKA guru sebelum mendapatkan sertifikat profesional, diperoleh gambaran bahwa nilai rata-rata nasional adalah 42,25 (skala 100), dengan sebaran terbanyak sekitar 80-90 ribu guru pada interval nilai 35-40. Hanya 8 dari 33 provinsi

---

tahun 2007, PIRLS tahun 2006, serta data tingkat literasi dan kelulusan tahun 2010. Peringkat juga disusun berdasarkan negara-negara yang berhasil memberikan status tinggi pada guru dan memiliki budaya pendidikan. Evaluasi terhadap kualitas pembelajaran akan dibahas lebih detail dalam edisi lengkap Laporan dan Analisis Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa tentang Dunia Pendidikan Indonesia Mutakhir.



yang nilainya berada di atas rata-rata nasional. Sementara itu, data hasil UKG secara *online* yang dilakukan setelah guru memperoleh sertifikat profesional menunjukkan nilai rata-rata nasional sebesar 45,82 (skala 100), dengan sebaran terbanyak sekitar 60-70 ribu guru pada interval nilai 42-43. Dalam UKG, hanya 7 dari 33 provinsi yang nilainya di atas rata-rata nasional.

Hasil UKA dan UKG juga menunjukkan bahwa nilai rata-rata nasional terendah selalu dimiliki oleh guru SD, yakni 36,9 (UKA) dan 42,05 (UKG), padahal saat ini guru SD berjumlah sekitar 1,6 juta atau sekitar 55% dari total jumlah guru di Indonesia.<sup>14</sup> Hasil UKA dan UKG ini juga menunjukkan bahwa program sertifikasi guru tidak signifikan meningkatkan kompetensi guru. Uniknya, hasil uji kompetensi ini ternyata tidak sejalan dengan hasil kelulusan UN yang hampir mencapai 100 persen, dan juga tidak sesuai dengan peringkat provinsi kelulusan UN. Sebaran provinsi yang memperoleh nilai UKA dan UKG di atas rata-rata nasional hanya terbentang dari Sumatera Barat hingga Bali. Hal ini jelas menunjukkan kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia.

Masalah kesenjangan ini bukannya tidak disadari pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian

---

14 Data diolah dari laporan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP) Kemendikbud tahun 2012. Evaluasi terhadap manajemen sekolah dan kualitas guru SD akan dibahas lebih detail dalam edisi lengkap Laporan dan Analisis Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa tentang Dunia Pendidikan Indonesia Mutakhir.



Indonesia tumbuh pada kisaran angka 6% setiap tahunnya. Sayangnya, pertumbuhan ini tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia diiringi meningkatnya Rasio Gini<sup>15</sup> yang menggambarkan kesenjangan antarkelompok masyarakat. Pada tahun 2009, Rasio Gini Indonesia 0,37 dan naik ke angka 0,38 di tahun 2011. Tahun 2012, Rasio Gini Indonesia meningkat lagi menjadi 0,41. Padahal, secara akademis, Rasio Gini di atas 0,4 berpotensi mengganggu stabilitas sosial akibat kesenjangan. Data BPS juga menyebutkan bahwa pada tahun 2011, pendapatan dari 20% penduduk berpendapatan tertinggi di Indonesia setara dengan 48,42% dari total pendapatan rumah tangga di Indonesia. Sebaliknya, pendapatan dari 40% penduduk berpendapatan terendah di Indonesia hanya setara dengan 16,85% total pendapatan rumah tangga di Indonesia.<sup>16</sup>

Rasio Gini ini kemudian dikembangkan untuk melihat kesenjangan pendidikan dan kualitas SDM. Misalnya pada Februari 2012 diketahui bahwa 55,51% tenaga kerja Indonesia maksimal hanya tamat SD, sedangkan yang tamatan SMA hanya 17,2%. Data BPS mengenai indikator pendidikan, baik angka partisipasi sekolah maupun angka

---

15 Rasio Gini adalah proporsi antara persentase kumulatif pendapatan dengan persentase yang menerima pendapatan. Rasio Gini yang mendekati nol menunjukkan pendapatan masyarakat sangat merata. Adapun jika Rasio Gini mendekati satu, pendapatan sangat bervariasi dan terjadi perbedaan yang sangat besar antara yang kaya dan yang miskin.

16 *The Jakarta Post*, 5 Juni 2012.



## IRONI PEMERATAAN PENDIDIKAN

buta huruf, juga memperlihatkan bahwa kesenjangan pendidikan itu jelas terjadi. Hasil UN, UKG, akreditasi institusi pendidikan, bahkan peta sebaran siswa berprestasi juga akan menunjukkan perbedaan kualitas pendidikan yang cukup mencolok. Ketimpangan ini nyata terlihat antara data pendidikan di provinsi DKI Jakarta dengan Papua, atau antara potret pendidikan di Pulau Jawa dengan di Nusa Tenggara, atau antara kualitas pendidikan di daerah pusat kota dengan kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Padahal, jelas tertera bahwa misi pertama pendidikan nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.





## BERANDA YANG TIDAK TERAWAT

**P**POTRET UTUH PENDIDIKAN INDONESIA tidak dapat diperoleh dari gambaran pendidikan di kota-kota besar, namun harus juga menilik ke daerah 3T. Kualitas dan kuantitas guru misalnya, walaupun jumlah guru secara nasional kelebihan sekitar 500 ribu orang, namun banyak sekolah di kawasan 3T yang malah kekurangan guru. Wajar saja, 68% sekolah yang kelebihan guru ada di perkotaan, sementara 66% sekolah terpencil justru kekurangan guru sebagaimana yang dilaporkan World Bank. Kurangnya kualitas guru ini setidaknya tergambar dari pengalaman



## BERANDA YANG TIDAK TERAWAT

program Pendampingan Sekolah Beranda oleh Makmal Pendidikan di Kepulauan Natuna yang menunjukkan bahwa hanya 3 dari 50 guru SD yang mampu menjawab pertanyaan “Berapa hasil  $1 - (1/3 + 1/4)$ ?”. Bila gurunya saja tidak mampu menjawab dengan benar, tidak heran bila muridnya juga demikian.

Ketimpangan serupa juga jelas terlihat di beberapa kota di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. Keterbatasan jumlah guru membuat kualitas pembelajaran di Papua terbilang rendah. Beberapa guru mata pelajaran, termasuk yang diujikan, tidak ada sehingga guru mata pelajaran lain pun merangkap. Anggota TNI pos pengamanan perbatasan yang tidak dibekali pendidikan guru akhirnya juga kerap membantu. Satu guru mengajar dua hingga enam kelas bukan hal yang asing di beberapa wilayah Papua. Sarana dan prasarana minim, akses ke sekolah sulit, kultur masyarakat pun kurang mendukung pendidikan anak. Sejumlah siswa di Papua harus menempuh perjalanan 2-3 jam berangkat dan pulang sekolah naik turun bukit. Tidak sedikit siswa yang meninggalkan sekolah 1-2 bulan karena harus membantu orangtua bekerja atau ada upacara adat.<sup>17</sup>

Program Pendampingan Sekolah Beranda di Bengkayang, Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Malaysia juga mengungkapkan ketimpangan pendidikan. Akses untuk ke sekolah tidak dapat ditempuh dengan mobil, melainkan harus menggunakan sepeda motor dan sampan tanpa pengaman. Jalur darat tak dapat ditempuh jika

<sup>17</sup> Kompas, 2 Desember 2011.



hujan karena becek dan licin, tergelincir dari jalur motor berarti terjebak di kubangan lumpur. Hujan deras berarti libur sekolah. Ban motor bocor, rantai putus, dan berbagai kerusakan motor lainnya, berarti bersiap mendorong motor berkilo-kilo meter. Sementara di jalur sungai, mesin sampan sering mati jika menabrak kotoran sungai atau potongan kayu yang terapung. Kedua jalur dilalui tanpa lampu penerang jalan, tanpa sinyal *handphone*. Guru dan siswa sudah terbiasa berjalan hingga lima kilometer melewati hutan dan bebatuan untuk mencapai sekolah. Bahkan, ada kepala sekolah yang berjalan kaki selama sembilan jam untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Makmal Pendidikan! Siswa juga terbiasa tidak beralas kaki atau menggunakan sandal jepit di sekolah karena kondisi jalan yang sering tergenang air.

Ketimpangan akses ini juga terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sejumlah siswa harus menempuh jarak beberapa kilometer, menembus hutan belantara dan perbukitan dari rumah ke sekolahnya dengan berjalan kaki. Sebagian besar guru di sana adalah guru honorer, bahkan ada kepala sekolah yang sudah mengabdikan belasan tahun masih berstatus guru honorer.<sup>18</sup>

Potret ketimpangan pendidikan juga dapat dilihat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Hingga tahun 2009, tercatat 8.502 anak di Kepulauan Mentawai tidak tersentuh pendidikan dasar. Mereka tersebar di sepuluh wilayah kecamatan di Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan. Tidak mudah

---

18 *Kompas*, 10 Desember 2012.



## BERANDA YANG TIDAK TERAWAT

mendirikan sekolah-sekolah di pedalaman karena banyak permukiman yang hanya dihuni sekitar 50 orang.<sup>19</sup>

Potret buram pendidikan di wilayah perbatasan memang bukan hal baru. Beranda terdepan Indonesia yang seharusnya tampak indah untuk menyambut tamu yang datang itu seolah menjadi gudang (ter)belakang yang kumuh. Bagaimana tidak, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia misalnya, mencetak *hattrick* sebagai provinsi dengan angka kelulusan UN terendah di Indonesia. Angka melek huruf di NTT baru sekitar 88%, padahal pemerintah mengungkapkan bahwa sekitar 93% masyarakat Indonesia sudah melek huruf. Fakta di NTT ini rupanya disaingi Sanggau, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di Sanggau, 30% masyarakatnya tidak bisa berbahasa Indonesia dan buta huruf, dengan 5-10% anak usia pendidikan dasar putus sekolah.

Dari 34 kota/kabupaten di 12 provinsi yang berbatasan dengan 10 negara tetangga<sup>20</sup>, masih banyak fakta yang sudah ataupun belum terungkap dari beranda negara kita ini. Ya, beranda terdepan yang mestinya enak dipandang itu malah tertinggal, terdepan dalam ketertinggalan. Mulai dari keterbatasan sarana dan fasilitas, akses pendidikan dan kesehatan yang begitu sulit hingga minimnya kesejahteraan.

---

19 *Kompas*, 23 Mei 2011.

20 Data ini belum memasukkan Provinsi ke-34, yakni Kalimantan Utara, yang juga berbatasan langsung dengan Malaysia..



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

Pemerintah bukan tanpa perhatian melihat kesenjangan ini. Beberapa program pendidikan digulirkan, mulai dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Sarjana Mendidik di wilayah 3T, kerja sama dengan TNI, hingga pembangunan perguruan tinggi di wilayah beranda Indonesia. Namun, kue pembangunan yang telanjur tidak tersebar merata membuat berbagai program pendidikan di wilayah ini butuh kesungguhan dan kerja keras dalam merealisasikannya. Butuh penyesuaian dan penahapan serta sinergi program dengan segenap elemen terkait. Jika tidak, program wajib belajar 9 tahun hanya omong kosong di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina karena beberapa pulau hanya mempunyai SD, tidak mungkin anak-anak melanjutkan ke SMP. Pelajaran komputer juga hanya akan berhenti sebatas angan di Desa Suruh Tembawang, Kabupaten Entikong, Kalimantan Barat (berbatasan dengan Malaysia), dan Distrik Sota (Merauke, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini) karena para siswa belum pernah melihat komputer dan listrik pun sering padam.





## INDONESIA TIMUR JUGA INDONESIA

*“Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.”*

**D**I AWAL MASA REVOLUSI melawan penjajahan, R. Soeraryo menciptakan lagu yang berjudul “Dari Barat Sampai ke Timur” untuk mengobarkan semangat nasionalisme. Judul dan lirik lagu yang mirip lagu kebangsaan Prancis tersebut diganti 18 tahun kemudian menjadi “Dari Sabang Sampai Merauke” dalam perjuangan membe-



baskan Irian Barat. Dalam perjalanannya, identitas kebangsaan memang menjadi tantangan dalam pembangunan di Aceh maupun Papua. Konflik di Aceh mereda pasca-tsunami di akhir tahun 2004. Aceh juga mendapat berbagai keistimewaan di antaranya dengan menerapkan syariat Islam dan memiliki beberapa partai politik lokal.

Sementara itu, kawasan timur Indonesia terus bergelolak, apalagi setelah lepasnya provinsi Timor Timur menjadi negara Timor Leste. UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua juga tidak menjadi solusi karena kekerasan dan ketidakadilan masih terus menyelimuti Bumi Cendrawasih. Wilayah timur Indonesia sebenarnya memiliki banyak sekali potensi, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hasil hutan, hasil tambang, hingga potensi wisata alam. Sayangnya, berbagai potensi kekayaan alam ini justru lebih banyak dinikmati penduduk Ibu Kota bahkan negara asing. Kesenjangan pun kian terasa. Alhasil, enam provinsi di Indonesia dengan persentase kemiskinan tertinggi berturut-turut adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Praktis hanya Provinsi Sulawesi Barat (posisi ke-4) yang termasuk dalam kawasan tengah Indonesia, sisanya masuk kawasan timur Indonesia.

Bukan kebetulan Papua menjadi provinsi dengan angka buta huruf tertinggi, diikuti oleh NTB. Ketika persentase penduduk usia 15-44 tahun yang buta huruf di Indonesia tahun 2011 hanya sekitar 2,3%, di Papua persentasenya mencapai 34,83%, lebih rendah 32,53% atau 15 kali lipat rata-rata nasional. Bukan kebetulan juga jika tiga provinsi



di Indonesia dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah berturut-turut adalah Papua (65,36), NTB (66,23) dan NTT (67,75). Cukup jauh dari rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2011 sebesar 72,77. Ketimpangan kualitas pendidikan ini jelas bukan kebetulan karena sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Ketika banyak sekolah di Ibu Kota yang kelebihan jumlah guru, guru-guru di beberapa wilayah Papua justru jarang hadir karena berbagai alasan. Mulai dari kendala jarak dan transportasi, penugasan dan urusan administrasi, hingga sibuk mencari penghasilan tambahan. Guru baru-lah hadir menjelang ujian, alhasil hanya sekitar 30% kurikulum yang tersampaikan ke siswa. Mekanisme *reward* berupa tunjangan tambahan dan *punishment* berupa sanksi tidak mempan. Kesulitan guru ditambah dengan faktor budaya dan kepedulian orangtua yang kurang mendukung. Belum lagi dialek beberapa suku yang saling tertukar dalam membunyikan konsonan, seperti “p” diucapkan menjadi “b”, “j” dilafalkan “y”, dan “s” berubah menjadi “t”.<sup>21</sup>

Demikian pula halnya dengan NTT, ketika jumlah guru di Indonesia kelebihan sekitar 500 ribu guru, guru di NTT masih kurang belasan ribu guru. Guru-guru yang ada di NTT pun sebanyak 74,63% belum berkualifikasi pendidikan D4/S1, dan 85,63% guru di sana belum bersertifikasi. Pada saat anggaran pendidikan ditetapkan sebesar 20% dari APBN/APBD, anggaran pendidikan di NTT pada tahun 2009 hanya 50 miliar rupiah dari APBD sebesar 875 miliar rupiah (5,7%). Anggaran pendidikan di NTT pada

---

21 *Kompas*, 15 Juni 2011.



tahun 2010 naik sedikit menjadi 80,7 miliar rupiah dari APBD sekitar 1,2 triliun rupiah (6,7%). Pada tahun 2012, NTT untuk kesekian kalinya tercatat sebagai provinsi dengan angka kelulusan Ujian Nasional terendah. Untuk kelulusan UN SMA tahun 2012 misalnya, ketika secara nasional angka kelulusan UN mencapai 99,5%, angka kelulusan UN di NTT hanya 94,5%.<sup>22</sup>

Minimnya anggaran untuk pendidikan di NTT tidak terlepas dari prioritas permasalahan yang ada di sana, terutama dari aspek kesehatan dan ekonomi yang masih memprihatinkan. Menurut Prof. Dr. Mia Noach, Dosen Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, persoalan pendidikan di NTT sejak tahun 1990-an tidaklah berubah, yaitu seputar kualitas guru yang masih rendah, kekurangan tenaga guru, alokasi anggaran pendidikan di bawah 10% dari total APBD, rendahnya kesejahteraan guru, keterbatasan sarana dan prasarana belajar, dihapuskannya sekolah guru, dan dukungan dari pihak orangtua yang lemah. Hasilnya dapat dilihat dari rendahnya IPM di NTT. Ketika rata-rata lama bersekolah secara nasional 7,6 tahun, rata-rata lama bersekolah di NTT cuma 6,6 tahun.<sup>23</sup>

Potret buram pendidikan di NTT dikuatkan dengan pengalaman program Pendampingan Sekolah Beranda Makmal Pendidikan di Rote. Sudah menjadi permakluman apabila guru datang siang, pulang dan pergi ke ibu kota kabupaten untuk urusan di luar kegiatan belajar mengajar dengan meninggalkan murid-murid mereka.

---

22 *Kompas*, 25 Mei 2012.

23 *Kompas*, 17 Juni 2011.



Potret kesenjangan pendidikan juga jelas terlihat di pulau-pulau terpencil di kawasan timur Indonesia. Pulau Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya misalnya, di sana masih banyak sekolah rusak yang belum tersentuh perbaikan. Guru mata pelajaran yang diujikan masih kurang, dan pendidikan terakhir para gurunya pun masih Sekolah Pendidikan Guru (SPG) atau diploma 2. Dari 205 guru, yang sudah ikut sertifikasi belum sampai 20 orang.<sup>24</sup> Hasil UKA dan UKG di Provinsi Maluku dan Maluku Utara juga termasuk yang paling rendah dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Pengalaman program Pendampingan Sekolah Beranda Makmal Pendidikan mengungkapkan bahwa guru di wilayah kepulauan Maluku hampir tidak pernah memperoleh akses pengembangan diri, bahkan untuk akses informasi pun minim. Pengawas sekolah terkendala untuk dapat datang ke sekolah setiap bulan karena sarana transportasi antarpulau tidaklah mudah, sementara sekolah yang harus didatangi cukup banyak.

Wajah pendidikan kawasan timur Indonesia mungkin memang tidak merepresentasikan wajah pendidikan Indonesia. Namun, fakta-fakta yang ada itu tidak bisa dibantah bahwa kesenjangan dalam dunia pendidikan kita benar-benar menganga. Perbaikan pendidikan dan pembangunan sebenarnya terus berjalan, namun terlihat lambat karena terlalu jauh tertinggal dengan wilayah barat Indonesia, apalagi dengan Ibu Kota. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan berbagai program yang digulirkan pemerintah terbukti belum mampu menyelamatkan pendidikan di kawasan timur

---

24 *Kompas*, 20 Juni 2012.



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

Indonesia. Perhatian pemerintah masih setengah hati dan banyak terhenti di tataran rencana tanpa totalitas implementasi.

Pengalaman program Pendampingan Sekolah Beranda Makmal Pendidikan menemukan fakta bahwa jangankan pemerintah pusat, pihak dinas pendidikan daerah pun hampir tidak pernah mengunjungi sekolah di kawasan 3T, kecuali ada acara seremonial dari pusat. Kawasan timur Indonesia merupakan wilayah perbatasan paling timur dan selatan di Indonesia. Fakta bahwa berbagai permasalahan pendidikan (juga masalah ekonomi dan kesehatan) yang sudah berlangsung puluhan tahun tidak juga tertangani, jelas menunjukkan ketidakadilan dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Kawasan timur Indonesia juga bagian dari NKRI sehingga tidak seharusnya ketimpangan kualitas SDM tampak begitu nyata.





Foto: <http://antarabogor.com/>

## WAJAH KETIDAKADILAN KIAN TAMPAK

**“SEMUA KEBIJAKAN** dapat diukur dengan keadilan,” ungkap Aristoteles. Pemerintah boleh saja mengklaim kebijakan dan program pendidikan yang digulirkan sudah sukses, namun ukuran sejati dapat dilihat dari sejauh mana prinsip-prinsip keadilan dalam kebijakan dan program sudah dipenuhi. Foto jepretan jurnalis Antara Bogor di atas menggambarkan betapa prinsip keadilan belum sepenuhnya diterapkan. Sudah enam tahun lamanya, siswa SDN Tajur 7 Citeureup, Bogor, belajar dalam kondisi tidak nyaman. Satu kelas dijadikan dua ruangan dengan hanya disekat papan tulis. Agar tidak ricuh, guru mengajar bergantian, jika satu guru menerangkan, guru yang lain



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

memberikan tugas kepada siswanya agar diam. Namun, dalam pelaksanaannya, guru dan siswa kerap mencuri dengar pelajaran kelas di sebelahnya, yang tentunya membuat pembelajaran kurang efektif. Satu lokal digunakan jadi beberapa kelas dengan sekat seadanya ini juga masih dapat ditemui di daerah-daerah lain, termasuk kota penyangga Ibu Kota seperti Depok dan Bekasi.

Keterbatasan ruang kelas bahkan mengharuskan siswa belajar di luar kelas, seperti yang dirasakan siswa kelas II dan IV SDN Jangkurang I di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.<sup>25</sup> Sementara kondisi yang sama memaksa siswa SDN 008 Sei Beduk, Kota Batam menumpang belajar di rumah susun.<sup>26</sup> Selain keterbatasan ruang, ada juga yang terkendala dengan tidak adanya sarana belajar di kelas. Menyikapi tidak adanya meja kursi, siswa SDN Rengasdengklok Selatan 2, Kabupaten Karawang, dan SD Negeri 64/VII Sukasari, Kabupaten Sarolangun, Jambi, memilih untuk belajar di lantai. Kondisi yang sama mengharuskan siswa SMP 13 Kecamatan XIV Kota, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, membawa sendiri kursi dari rumah.

Kondisi kelas dan pembelajaran yang kurang layak yang diungkapkan di atas hanya sebagian kecil yang tampak. Ibarat fenomena gunung es, jumlah yang belum terekspos jauh lebih banyak. Jika kondisi tersebut masih banyak ditemui di daerah sekitar Ibu Kota, dapat dibayangkan betapa menyedihkannya kondisi kelas dan pembelajaran di daerah pelosok Indonesia. Beberapa kasus di

---

25 *Pikiran Rakyat*, 5 November 2012.

26 *Kompas*, 8 November 2012.



## WAJAH KETIDAKADILAN KIAN TAMPAK

atas juga tentunya tidak serta-merta menggambarkan kondisi keseluruhan sekolah di Indonesia. Masih banyak sekolah lain yang bangunannya bagus dan luas, bahkan dilengkapi AC di setiap ruang kelas. Namun, di situlah salah satu letak ketidakadilannya: pembangunan infrastruktur yang memengaruhi kualitas pembelajaran tidak terdistribusi merata.

Ketidakadilan juga berlaku dalam bentuk berbeda. Ada banyak kasus siswa-siswa miskin yang belum bayar uang sekolah dilarang mengikuti pelajaran di sekolah atau dilarang mengikuti ujian. Kasus di Tasikmalaya, siswa yang dilarang mengikuti pelajaran ini jumlahnya puluhan dan lebih menyedihkan lagi, nama-nama mereka disebutkan ketika upacara bendera sehingga salah seorang siswa jatuh pingsan karena sedih dan malu. Lain lagi dengan sebuah kasus di Manado, karena tidak membayar uang komite, siswa dipaksa mengikuti ujian sekolah di luar kelas.<sup>27</sup> Kasus semacam ini mengiris nurani kita yang masih peduli dengan kemajuan anak-anak bangsa. Dengan mengikuti pelajaran dan ujian, bukankah para siswa miskin masih berani berharap akan masa depan yang lebih baik? Padahal, dengan larangan mengikuti pelajaran dan ujian, tidak otomatis uang sekolah mampu dilunasi.

Ironisnya, dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR sehari sebelum peringatan HUT RI ke-66, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan bahwa sudah tidak ada lagi warga berpenghasilan rendah yang kesulitan mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan.

27 *Tempo*, 12 Maret 2013.



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

setelah menyampaikan pidato, dalam kunjungannya ke SD Babakan Madang 01, Sentul, Kabupaten Bogor, Presiden SBY tampak terkejut melihat potret nyata sekolah di Indonesia, dan meminta supaya anggaran pendidikan diprioritaskan untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak. "Kantor guru kecil sempit dan desak-desakan. Atapnya tidak karuan kalau hujan bocor bangunannya juga sudah tidak layak. Saya lihat perpustakaanya juga tidak layak," ujar Presiden di hadapan pejabat dan para guru.<sup>28</sup>

Sungguh miris jika SD Babakan Madang 01 yang berdekatan dengan Ibu Kota saja dianggap tidak layak, lalu bagaimana dengan SD lain di pelosok Indonesia? Padahal, berdasarkan data Kemendiknas tahun 2011, masih terdapat 74.806 sekolah (41,31%) di bawah Standar Mutu Pelayanan (SPM). Jumlah riil di lapangan bisa jadi lebih banyak lagi.

---

28 *Republika*, 2 Agustus 2011.





## KEBIJAKAN YANG MENGUSIK KEADILAN

**D**ALAM *BUMI MANUSIA*, Pramoedya Ananta Toer menulis begini: “Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.” Pram benar, kualitas pendidikan erat kaitannya dengan kualitas SDM dan kemajuan suatu bangsa, sekarang dan pada masa mendatang. Menyoal kualitas pendidikan Indonesia berarti memerhatikan seluruh komponen pendidikan dari desa paling barat hingga desa paling timur Indonesia, dari pulau paling utara sampai pulau paling selatan Indonesia. Di sinilah akan jelas terlihat gap kualitas siswa, guru, sekolah, dan pendidikan di setiap penjuru Indonesia.



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

Kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah seharusnya tegas memerhatikan kondisi ini. Prioritas pembangunan pendidikan semestinya diarahkan untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan ini. Sayangnya, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah kerap kali justru semakin mengusik rasa keadilan dalam memperoleh hak pendidikan. Sebut saja kebijakan mengenai Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), Ujian Nasional, perubahan kurikulum, kelas internasional, jalur mandiri kampus, kesenjangan antara PTN dan PTS, kesenjangan antara sekolah dengan madrasah, dan sebagainya.

Kebijakan mengenai RSBI misalnya, alih-alih meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, yang terjadi justru pengastaaan pendidikan: sekolah berlabel 'standar internasional' hanya dapat dinikmati oleh golongan menengah ke atas. Kuota 20% untuk siswa dari masyarakat tidak mampu, seperti halnya yang lebih dulu terjadi di PTN favorit, akhirnya hanya angka di atas kertas. Jangankan bersaing untuk memperoleh pendidikan berkualitas, siswa dari masyarakat marginal bahkan sudah gagal bersaing untuk bermimpi. Keadilan jelas terusik, pendidikan seolah kembali ke zaman kolonial ketika hak untuk memperoleh pendidikan hanya diberikan untuk para penguasa dan kaum feodal. Pada tahun 2011, Dedi Suwendi 'Mi'ing' Gumelar, salah seorang anggota Komisi X DPR RI sudah menyampaikan, "SBI harus dikoreksi. SBI hanya menjadi market label. Substansinya tidak memiliki mutu berkelas internasional."

Dihapuskannya RSBI oleh Mahkamah Konstitusi awal Januari 2013 adalah berita kemenangan untuk pendidikan



## KEBIJAKAN YANG MENGUSIK KEADILAN

non-diskriminatif. Kendati demikian, nilai-nilai liberalisasi dan komersialisasi sudah kadung tertanam. Akibatnya, paradigma pendidikan sebagai ladang bisnis belum sepenuhnya tercabut seiring dengan dicabutnya plang RSBI.

RSBI dihapuskan persoalan ketidakadilan belumlah berakhir. Jika kebijakan Ujian Nasional coba dikaji lebih dalam, keadilan kembali terusik. Bagaimana bisa standar kelulusan disamakan antara sekolah dengan fasilitas lengkap dengan sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana, antara sekolah dengan guru lulusan S1 PTN favorit yang mengajar sesuai dengan kompetensi yang diampunya dengan guru lulusan SMA yang harus mengajar beberapa kelas sekaligus. Jelas berbeda pembelajaran berhitung dan bahasa di kota-kota besar dengan di daerah pedalaman yang jangankan siswa menguasai bahasa Inggris, gurunya pun masih kesulitan untuk berbahasa Indonesia. Keadilan semakin terusik melihat siswa yang jujur justru tidak lulus, sementara siswa yang bodoh mendapatkan nilai nyaris sempurna.

Belum lagi melihat guru, pihak sekolah, bahkan dinas pendidikan menghalalkan segala cara agar siswa mereka dapat lulus, esensi pendidikan pun tergadaikan. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila beberapa pakar dan praktisi pendidikan, di antaranya Munif Chatib, gencar menyuarakan mengenai reposisi atau refungsi UN sebatas tes diagnosis atau pemetaan kualitas pendidikan saja. Jika Ujian Nasional dilakukan dengan jujur dan difungsikan untuk memetakan kualitas pendidikan, mungkin masih akan mendatangkan kebermanfaatan. Akan tetapi, ketika Ujian



Nasional digunakan sebagai syarat kelulusan di tengah ketimpangan kualitas pendidikan Indonesia, sungguh hanya akan menimbulkan banyak kemudaratatan.

Persoalan ketidakadilan juga ada pada kurikulum. Pergantian kurikulum yang tergesa-gesa tanpa kajian mendalam mengusik keadilan. Di beranda Indonesia, kurikulum lama baru saja hendak diterapkan, kurikulum sudah kembali berganti. Penambahan jam pelajaran juga tidak mungkin dilakukan bagi sekolah yang selama ini menyelenggarakan pendidikan dua atau bahkan tiga *shift* karena keterbatasan lokal kelas. Pembelajaran tematik terintegrasi jangankan terimplementasikan, istilahnya pun terdengar asing, bahkan mungkin sulit diucapkan oleh guru-guru di pedalaman. Teknologi informasi terintegrasi hampir dapat dipastikan akan banyak masalah dalam penerapannya di lapangan, terutama untuk daerah yang terisolasi secara geografis. Bukan hanya sinyal dan komputer yang tidak ada, listrik pun belum tentu tersedia. Tengok saja implementasi UKG *online* yang banyak terkendala teknis di lapangan.

Pembengkakan anggaran kurikulum dari 684,4 miliar rupiah menjadi 2,4 triliun rupiah seperti yang dipertanyakan Panitia Kerja Kurikulum DPR jelas memperlihatkan ketidakmatangan perencanaan kurikulum, *trial and error*. Pergantian kurikulum telah gagal melihat kebutuhan dan permasalahan aktual yang terjadi di lapangan. Yang lebih mengemuka justru sisi proyek mercusuar yang rapuh sehingga tidak heran bila hasilnya tidak akan memberikan dampak berarti bagi perbaikan pendidikan di Indonesia.



## KEBIJAKAN YANG MENGUSIK KEADILAN

Kebijakan kelas internasional di berbagai sekolah dan perguruan tinggi juga jelas menunjukkan diskriminasi pendidikan. Demikian pula dengan ujian mandiri, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, yang lebih kental nuansa seleksi kemampuan finansial daripada seleksi kemampuan akademis. Ketika orientasi pendidikan beralih ke bisnis dan mengejar keuntungan, ketidakadilan dalam memperoleh hak pendidikan takkan dapat dihindari. Kesenjangan antara sekolah dan perguruan tinggi negeri dengan swasta juga masih memunculkan warna yang amat kentara. Ketidakadilan yang dirasakan guru honorer jika dibandingkan dengan guru PNS sudah menjadi rahasia umum, padahal bisa jadi lama pengabdian dan kompetensi guru non-PNS lebih baik. Kesenjangan kualitas sekolah umum dengan madrasah juga nyata terlihat.

Beragam persoalan ketidakadilan di atas mendorong kita untuk merenung. Di satu sisi, berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan memang membantu peningkatan kualitas pendidikan. Namun, di sisi lain, kegagalan dalam menyelenggarakan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat membuat pemerintah tidak pernah tuntas dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) misalnya, yang seharusnya jelas-jelas sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sekolah, dalam implementasinya justru menjadi ladang korupsi dana pendidikan. Audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan juga menghasilkan banyak temuan penyelewengan dana BOS, bahkan menyebutkan



bahwa 6 dari 10 sekolah menyelewengkan dana BOS.<sup>29</sup>

Bagi yang tidak korupsi, keberadaan BOS justru merepotkan pihak sekolah dalam urusan tetek bengek administrasinya. Membuat pusing dalam mengelola peruntukannya. Misalnya, alokasi dana BOS untuk gaji guru honorer sangat terbatas, sementara sebagian besar guru di daerah masih berstatus honorer. Di sisi lain, dana BOS semakin membatasi sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan sekolah.

Pemberian beasiswa juga tidak jauh berbeda, membuka kran kebocoran anggaran dan banyak memuat ketidakadilan. Kolusi dan nepotisme bermain dalam pemberian beasiswa jelas menunjukkan ketidakadilan. Penyaluran beasiswa kepada yang tidak berhak hanya demi memenuhi kuota beasiswa juga jelas bertentangan dengan prinsip keadilan. Pembangunan PTN dan perubahan status PTS menjadi PTN di berbagai wilayah juga tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan pemerataan pendidikan. Jika kualitas pendidik tidak diperbaiki, hanya akan menambah beban operasional penyelenggaraan pendidikan. Jika perekonomian dan infrastruktur daerah tidak dibangun, lulusan PTN daerah pun akan kembali menyesaki kota-kota besar.

---

29 Diolah dari data hasil audit BPK yang dilansir Indonesia Corruption Watch (ICW). Bantuan Operasional Pendidikan akan dibahas lebih detail dalam edisi lengkap Laporan dan Analisis Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa tentang Dunia Pendidikan Indonesia Mutakhir.



## KEBIJAKAN YANG MENGUSIK KEADILAN

Peserta didik juga sangat merasakan ketidakadilan dalam kebijakan pendidikan pemerintah, mulai dari yang sifatnya fisik (seperti pemerataan fasilitas dan sarana prasarana ataupun pembiayaan sekolah yang jelas terukur dalam bentuk materi) hingga yang sifatnya non-fisik (misalnya penyaluran minat dan bakat). Keberagaman kemampuan dan preferensi bukannya difasilitasi, malah dipaksa menjadi bentuk produk pendidikan tertentu. Dilema dan ketidakadilan lebih dirasakan oleh siswa inklusi yang berkebutuhan khusus apalagi pendidikan di Indonesia masih segregatif. Bergabung dengan sekolah umum mengalami diskriminasi, mengikuti pendidikan khusus juga semakin terkucilkan.

Kebijakan pendidikan ternyata tidak cukup hanya sejalan dengan rancangan peningkatan kualitas pendidikan, namun juga dibutuhkan kebijakan pendidikan pro-rakyat yang berkeadilan. Adil memang berarti proporsional, tidak harus sama rata, namun keadilan jelas berseberangan dengan kesenjangan. Selama ini pemerintah memang sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, namun prinsip keadilan masih dirasakan sangat kurang, mulai dari pemerataan pendidikan secara geografis, pemenuhan hak pendidikan tanpa melihat status, hingga penetapan prioritas pendidikan. Ketimpangan ini takkan terjadi jika kebijakan pembangunan, baik infrastruktur, ekonomi, pendidikan ataupun kesehatan sudah tersebar secara adil dan merata.



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA



Secara konstitusional, prinsip-prinsip keadilan ini sebenarnya sudah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan, “... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....” Ya, tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seharusnya berdasarkan keadilan sosial.



## KEBIJAKAN YANG BERKEADILAN

**P**ERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL tahun 2013 mengangkat tema “Meningkatkan Akses dan Kualitas Berkeadilan”. Akses dan kualitas berkeadilan memang menjadi momok bagi penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran pendidikan dan dukungan berbagai pihak terkait yang semakin besar, ternyata tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Serapan anggaran Kemendikbud yang hanya 87,3% sepanjang tahun 2012 menunjukkan bahwa terjadi disparitas antara perencanaan dengan realisasi program, itu pun setelah terjadi lonjakan signifikan serapan anggaran di akhir tahun.



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

Inkonsistensi anggaran pendidikan, misalnya untuk pos kurikulum dan Ujian Nasional, menyebabkan Departemen Keuangan memblokir sebagian besar anggaran pendidikan. Realisasi program kerja pendidikan akhirnya banyak tertunda, apalagi dengan adanya berbagai indikasi korupsi di lingkungan Kemendikbud. Masyarakat yang menunggu lompatan kebijakan yang mendukung peningkatan akses dan kualitas berkeadilan akhirnya harus menunggu pemerintah yang masih sibuk dengan dirinya sendiri. Penyelenggaraan UN yang amburadul semakin mempertegas adanya kesalahan kebijakan pemerintah yang cukup mendasar dalam mengelola pendidikan di Indonesia.

Kebijakan pendidikan yang dikeluarkan masih jauh dari totalitas sehingga tidak tuntas menyelesaikan permasalahan pendidikan jangka panjang. Pembangunan fisik dan pemberian bantuan pendidikan yang tidak disertai dengan pemeliharannya akan menyisakan pekerjaan setiap tahunnya. Nuansa proyek lebih kental terlihat. Berbagai kebijakan pendidikan yang sifatnya *trial and error* akan menemui banyak kendala dalam implementasi di lapangan. Kondisi ini diperparah dengan berbagai kepentingan politik yang mengintervensi sehingga tidak heran bila kebijakan pendidikan terus berganti seiring pergantian pejabat. Padahal, program pendidikan adalah kerja jangka panjang, kerja untuk masa depan, sehingga kontinuitas kebijakan dan program pendidikan harus benar-benar diperhatikan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perbaikan pengelolaan pendidikan nasional tidak bisa tidak, harus dilakukan. Revolusi kebijakan pendidikan tampaknya bukan



## KEBIJAKAN YANG BERKEADILAN

pilihan tepat karena banyak biaya yang harus dikeluarkan; bukan hanya materi, tetapi juga biaya sosial. Reformasi pendidikan secara fundamental, total, dan gradual menjadi pilihan logis menuju pendidikan berkeadilan tanpa diskriminasi dan kesenjangan sosial.

Reformasi kebijakan pendidikan yang fundamental mensyaratkan perhatian lebih pada kondisi aktual di tengah masyarakat dan memberikan prioritas untuk pendidikan masyarakat yang kurang mampu dan kurang pintar, untuk kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Reformasi kebijakan pendidikan pada aspek yang fundamental akan mendatangkan efek domino perbaikan pendidikan yang luar biasa, akselerasi penyelesaian berbagai masalah pendidikan akan meningkat dengan cepat.

Selama ini kebijakan pendidikan memang dibuai dengan kemajuan semu pendidikan, tidak berdasar fakta di lapangan. Budaya 'Asal Bapak Senang' sepertinya memfilter berbagai permasalahan pendidikan Indonesia sehingga yang diterima para pemegang kebijakan hanya yang bagus-bagus. Padahal, tahapan awal dan mendasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan adalah ketepatan dalam melakukan identifikasi dan rumusan permasalahan. Landasan untuk berpikir dan bersikap takkan kokoh jika pemerintah jauh dari masyarakatnya.

Salah satu bentuk lain reformasi pendidikan yang fundamental adalah ketika kebijakan dan program pendidikan nasional yang digulirkan pemerintah didasarkan pada data riil di lapangan, bukan hanya dari data laporan di atas kertas. Pemerintah pusat dan daerah perlu lebih banyak



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

*blusukan* untuk melihat wajah nyata pendidikan Indonesia sehingga kebijakan yang diambil dan program yang dipilih memang tepat.

Reformasi kebijakan pendidikan juga perlu dilakukan secara total, menyeluruh, dan tidak setengah-setengah. Potret permasalahan pendidikan harus dilihat secara utuh, seluruh entitas dalam sistem pendidikan harus tersentuh, demikian pula upaya pemecahan permasalahannya. Perbaikan aspek fisik dan non-fisik harus dilakukan secara simultan. Perbaikan sekolah rusak yang tidak total hanya akan jadi proyek yang menghabiskan banyak anggaran. Pembangunan sekolah tanpa mempersiapkan sumber daya manusia pengelolanya juga hanya akan menambah beban operasional tanpa ada dampak terhadap perbaikan kualitas. Perbaikan insan pendidikan, institusi pendidikan, metode dan kurikulum, sistem pendidikan, hingga lingkungan dan budaya pendidikan juga perlu dilakukan secara simultan. Tak ada gunanya perbaikan kurikulum tanpa perbaikan kualitas guru. Perbaikan yang tidak dilakukan secara total selalu menyisakan permasalahan lama dan memunculkan masalah baru sehingga permasalahan tidak kunjung dapat diselesaikan.

Reformasi kebijakan pendidikan secara total juga mensyaratkan sinergi antara pendidikan dengan aspek-aspek kehidupan yang lain. Pembangunan pendidikan di daerah 3T yang total akan turut memerhatikan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sosial di tengah masyarakat. Pendidikan adalah bagian tak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga permasalahannya harus dapat dilihat secara utuh dan solusinya pun akan terkait dengan aspek



## KEBIJAKAN YANG BERKEADILAN

kehidupan bermasyarakat yang lain. Total juga bermakna tuntas, tidak setengah-setengah. Kebijakan dan program pendidikan yang dilakukan setengah-setengah, apalagi kurang dari itu, hanya akan mengekalkan permasalahan.

Salah satu turunan dari UU Sisdiknas adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang terdiri dari: 1) Standar Kompetensi kelulusan; 2) Standar Isi; 3) Standar Proses; 4) Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik; 5) Standar Sarana Prasarana Pendidikan; 6) Standar Pengelolaan; 7) Standar Pembiayaan Pendidikan; 8) Standar Penilaian Pendidikan.

Dalam konteks pendidikan formal, delapan standar tersebut sebenarnya sudah mencakup keseluruhan entitas yang perlu dibenahi. Sayangnya, selama ini pendidikan kita diidentikkan dengan pendidikan formal, sedangkan pendidikan informal dan nonformal kurang mendapatkan perhatian, padahal sekolah memiliki banyak keterbatasan. Selain itu, reformasi kebijakan dan program pendidikan belum total dilakukan. Tidak tuntas, parsial, tidak melihatnya secara utuh, setengah-setengah, dan masih berorientasi pada aspek-aspek tertentu yang mudah terlihat. Padahal, totalitas tidak harus diperlihatkan, totalitas akan tampak pada proses dan hasil.

Reformasi kebijakan pendidikan juga perlu dilakukan secara gradual, diperhatikan penahapannya. Menghasilkan perubahan menuju kebaikan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, apalagi jika ada resistensi dari *status quo*. Perubahan kebijakan yang tiba-tiba akan menimbulkan banyak penolakan, apalagi selama ini kebijakan dan program pendidikan banyak terkendala dalam hal sosia-



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

lisasi. Penolakan umumnya terjadi karena kekhawatiran dan ketidakpastian yang selalu mengiringi perubahan. Untuk itulah, tahapan yang dimaksud juga seharusnya melibatkan masyarakat selaku sasaran kebijakan dan program.

Dalam beberapa kebijakan dan program, penahapan ini sebenarnya sudah dilakukan, atau paling tidak sudah direncanakan. Permasalahan terbesar adalah dalam implementasi di lapangan, yakni tatkala penahapan ini tidak dilakukan atau dilakukan dengan tidak sebagaimana mestinya. Penahapan pun tidak dirasakan karena semuanya serba instan dan dadakan walaupun beberapa di antaranya sudah lama direncanakan. Ada kalanya penahapan yang dilakukan hanya formalitas, aktivitas dan evaluasinya tidak diketahui dengan pasti. Ada juga kebijakan dan program pendidikan yang sudah dilakukan secara bertahap namun tidak jelas alur dan arah penahapannya.

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan tahapan kebijaksanaan dan program pendidikan ini sering kali terletak pada kondisi perpolitikan dan perekonomian, bukan dari kondisi masyarakat. Kebijakan dan program pendidikan di Indonesia selama ini memang masih erat kaitannya dengan perpolitikan dan perekonomian nasional. Reformasi kebijakan pendidikan secara fundamental dan total pun kerap terkendala karena dua hal ini. Kebijakan dan program pendidikan menjadi bahan jualan politik sehingga setiap ganti pejabat ganti kebijakan dan program, baik di pusat maupun di daerah. Padahal, reformasi pendidikan tidak dapat dilakukan secara instan, butuh waktu dan kontinuitas untuk mewujudkannya.



## KEBIJAKAN YANG BERKEADILAN

Untuk menjamin kontinuitas tahapan kebijakan dan program pendidikan menuju pendidikan yang berkeadilan, perlu disusun *grand design* pendidikan nasional yang disepakati bersama oleh segenap entitas pendidikan nasional. Visi pendidikan yang diusung, strategi yang dipilih, hingga program pendidikan yang digulirkan perlu dijalankan dengan komitmen bersama. Dinamika politik dan ekonomi seharusnya hanya menjadi pertimbangan dalam melakukan penyesuaian, bukan penentu kebijakan pendidikan yang mengusung visi besar. Pendidikan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat tentunya terkait dengan politik dan ekonomi nasional. Namun, kebijakan pendidikan semestinya independen terhadap berbagai kepentingan pribadi dan golongan karena mengusung kepentingan masyarakat yang lebih besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.





## PENUTUP

**P**ERMASALAHAN PENDIDIKAN memang kompleks dan penyelesaiannya harus melibatkan seluruh pihak terkait, tidak hanya mengandalkan pemerintah. Semua elemen harus bersinergi dan bekerja untuk mewujudkan pendidikan yang diidam-idamkan. Bagaimanapun, untuk setiap perubahan yang bersifat makro, peran pemerintah melalui kebijakan sangatlah signifikan. Semuanya dimulai dari pembenahan internal pemerintah secara fundamental, total, dan gradual. Hal ini dimulai dari pergeseran paradigma bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat, bukan pejabat yang harus dilayani. Berikutnya disiplin dan kejujuran aparat untuk mewujudkan kedisiplinan dan ke-



## PENUTUP

jujuran SDM pendidikan. Terakhir, keteladanan dan itikad baik untuk memajukan pendidikan bangsa.

Reformasi kebijakan pendidikan secara fundamental, total, dan gradual menuju pendidikan berkualitas yang mencerdaskan dan berkeadilan tentu tidak mudah. Ada pihak-pihak pendukung *status quo* yang mungkin akan terganggu kenyamanannya. Ada masyarakat yang sudah skeptis dan apatis. Ada juga yang rendah diri dan *under estimate*. Namun, melihat tren kebijakan pendidikan, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta perkembangan tuntutan dan kemajuan zaman, perbaikan pendidikan nasional melalui reformasi kebijakan pendidikan sangat mungkin dilakukan. Semoga cita-cita pendidikan nasional dapat diwujudkan dan kita menjadi salah satu elemen penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan berkontribusi sebatas kemampuan optimal yang dapat kita berikan. Semoga.

Mari berbuat!



## SUMBER ACUAN

- Akuntono, Indra. 2011. *Beginilah Nasib Pendidikan di Perbatasan*. Kompas, 25 November. Jakarta
- Alisjahbana, Armida S. 2012. *Rasio Gini di Indonesia dalam Lima Tahun Terakhir*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- BPS RI. 2012. *Susenas 2003-2011; Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi Tahun 2003-2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS RI. 2012. *Susenas 2003-2011; Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, 1996-2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS RI. *Susenas 2003-2011; Persentase Penduduk Buta Huruf menurut Kelompok Umur Tahun 2003-2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Digdowiseiso, Kumba. 2010. "Measuring Gini Coefficient of Education: The Indonesian Cases", *Munich Personal RePEc Archive 19865*. Munich: Munich University Library
- Dinata, Wisal Mirza, dkk. 2011. *Di Tepi Batas Ku Bangun Negeriku: Jejak Langkah Pendampingan Sekolah di Tanah Rote*. Bogor: Rumah Buku Makmal



## SUMBERACUAN

- Endi, Severianus. 2012. *On Border, Children Prefer to Study in Malaysia*. The Jakarta Post, 22 Februari. Jakarta
- Goodenough, Tom. 2013. *Is This The Most Dangerous School Run in The World?* <http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/4898709/schoolchildren-face-dangerous-trip-to-class-in-indonesia.html>. Diunduh pada 8 Mei 2013
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Junaedi. 2012. *Berjalan Kaki Berkilo-kilo Meter Demi Bersekolah*. Kompas, 10 Desember. Jakarta
- Jusuf, Isa Anshar. 2013. *Tak Bayar Uang Komite, Siswa Ujian di Luar Kelas*. <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/12/079466480/Tak-Bayar-Uang-Komite-Siswa-Ujian-di-Luar-Kelas>. Diunduh pada 8 Mei 2013
- Kadir, Nurdin, dkk. 2011. *Di Tepi Batas Ku Bangun Negeriku: Jejak Langkah Pendampingan Sekolah di Tanah Bengkayang*. Bogor: Rumah Buku Makmal
- Katalog BPS 3101015. 2012. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Agustus 2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Kewa Ama, Kornelis. 2011. *Mutu Rendah, Pemda NTT Tidak Terganggu*. Kompas, 25 Mei. Jakarta
- Kompas. 2011. *Ribuan Anak Belum Terjangkau Pendidikan*. 23 Mei. Jakarta
- ----- . 2011. *NTT Dapat Perhatian Khusus*. 17 Juni. Jakarta



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

- ----- . 2012. *80 Siswa SDN Numpang Belajar di Rumah Susun*. 8 November. Jakarta
- ----- . 2011. *Ketertinggalan yang Melelahkan*. 2 Desember. Jakarta
- ----- . 2012. *Siswa Miskin Tak Bisa Ambil Ijazah*. 2 Februari. Jakarta
- ----- . 2012. *Terkucil di Pulau Terpencil*. 20 Juni. Jakarta
- Nandika, Dodi. 2007. *Pendidikan Indonesia di Tengah Gelombang Perubahan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Napitupulu, Ester Lince. 2012. *Pendidikan Tak Merata, Kualitas Masyarakat Tertinggal*. Kompas, 13 September. Jakarta
- Pikiran Rakyat. 2012. *Puluhan Murid SD Jangkurang Leles Belajar di Luar*. 5 November 2012. Bandung
- Purnomo, Kristianto. 2011. *Photo Story; Perjuangan untuk Pendidikan*. Kompas, 23 Mei. Jakarta
- Radar Bogor. 2012. *Satu Kelas Rame-rame*. 10 Januari. Bogor
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta: Sekretariat Negara
- Saputri, Dessy Suciati. 2012. *Belum Bayar Uang Sekolah, Murid Dilarang Masuk*. Republika, 2 Agustus. Jakarta



## SUMBERACUAN

- Sinaga, Andree. 2012. *Income, a Perilously Widening Gap*. The Jakarta Post, 5 Juni. Jakarta
- Suryadi, Ace, dan Dasim Budimansyah. 2004. *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru*. Bandung: PT Genesindo
- Udiutomo, Purwo. 2011. *Carut Marut Pendidikan, Kemana Saja Pemerintah?* <http://purwoudiutomo.com/2011/08/23/carut-marut-pendidikan-kemana-saja-pemerintah/> Diunduh pada 6 Mei 2013
- ----- . 2011. *Kebijakan Revitalisasi Pendidikan di Beranda Indonesia, Efektifkah?* <http://purwoudiutomo.com/2011/09/13/efektivitaskebijakan-revitalisasi-pendidikan-beranda/> Diunduh pada 6 Mei 2013
- ----- . 2013. *Karena RSBI Hanyalah Label*. <http://purwoudiutomo.com/2013/01/29/karena-rsbi-hanyalah-label/> Diunduh pada 6 Mei 2013
- ----- . 2013. *Outlook Pendidikan Nasional 2013*. <http://purwoudiutomo.com/2013/01/15/outlook-pendidikan-nasional-2013/> Diunduh pada 6 Mei 2013
- Wahyudi, M. Zaid. 2011. *Kusutnya Pendidikan di Papua*. Kompas, 15 Juni. Jakarta





## PROFIL MAKMAL PENDIDIKAN DOMPET DHUAFA

- Alamat : Bumi Pengembangan Insani, Jl. Raya Parung Bogor KM. 42  
Desa Jampang, Kecamatan Kemang,  
Kabupaten Bogor Jawa Barat 16310  
Telepon (0251) 8610817, 8610818,  
8612044 ekstensi 12  
Faksimile (0251) 8615016
- Alamat Situs : [www.makmalpendidikan.net](http://www.makmalpendidikan.net)
- Alamat Twitter : @MakmalDD
- Facebook : Makmal Pendidikan
- Kontak Kantor : •Mobil : 0812 8834 3101  
•PIN Blackberry : 2A3A5CA9

### Gambaran Umum Program

Makmal Pendidikan adalah sebuah laboratorium pendidikan yang berusaha menjawab kebutuhan terhadap pengembangan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan.



## 1. **Laboratorium Pengembangan Mutu Pendidikan (LPMP)**

LPMP merupakan departemen di bawah jejaring Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa yang membuat instrumen dan serangkaian uji coba seputar ukuran dan standardisasi proses perubahan objek pendidikan, untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi serta nilai tambah dengan turut memerhatikan proses dan metode pendidikan dan pembelajaran. Departemen ini membawahkan empat divisi, yaitu Penelitian dan Pengembangan, Pusat Data, Sistem Manajemen Kualitas, dan Pusat Sumber Belajar.

### a. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) fokus melakukan penyelidikan, pengkajian atau pemeriksaan yang teliti terhadap suatu masalah secara sistematis, objektif, kritis, dan ilmiah dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data untuk memecahkan suatu persoalan, meningkatkan pengetahuan, mendapatkan fakta baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik guna memberikan kemajuan dan nilai tambah bagi elemen pendidikan.

### b. Pusat Sumber Belajar (PSB)

Merupakan divisi yang fokus mengelola semua sumber yang dapat digunakan dalam belajar, yang (sementara ini) meliputi sumber belajar cetak, sumber belajar audio visual, aktivitas zona pustaka, pelatihan dan pendampingan kepastakaan, perpustakaan komunitas dan perpustakaan keliling, serta pengembangan media pembelajaran, baik se-



cara terpisah maupun terkombinasi, untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pembelajaran.

## **2. Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Peningkatan Kualitas Pendidikan merupakan departemen di bawah jejaring Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui dua divisi di bawahnya, yakni Pendampingan Sekolah dan Sekolah Laboratorium.

### **a. Pendampingan Sekolah**

Program yang diperuntukkan untuk sekolah yang berada di seluruh pelosok negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan pembelajaran. Program ini dilaksanakan selama 1-3 tahun.

### **b. Sekolah Laboratorium**

Merupakan program yang memberikan wewenang untuk melakukan pengelolaan sekolah secara utuh dan menyeluruh dalam rangka mengembangkan model atau inovasi dalam lingkup manajemen sekolah dan pembelajaran pada satu satuan pendidikan atau lebih dalam jangka waktu tertentu.

## **Jangkauan dan Jumlah Penerima Manfaat**

Penerima manfaat program pendampingan Makmal Pendidikan dari tahun 2010 sampai 2012 sebanyak 38 Sekolah Pendampingan, 8 Sekolah Pendampingan Pelatihan Cluster, 4 Sekolah Pendampingan Perpustakaan, dan 7 Sekolah Literasi Aplikatif. Periode penerima manfaat untuk



## PROFIL MAKMAL PENDIDIKAN

Sekolah Pendampingan adalah sekitar 1-3 tahun, sedangkan Pelatihan Cluster dan Pendampingan Perpustakaan hanya 6 bulan.

Sebaran area Sekolah Pendampingan menjangkau 22 provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung (1 sekolah), Bengkulu (1 sekolah), Daerah Istimewa Yogyakarta (1 sekolah), Jawa Barat (10 sekolah), Banten (3 sekolah), Jawa Timur (8 sekolah), Jambi (1 sekolah), Kalimantan Barat (1 sekolah), Kalimantan Selatan (3 sekolah), Kalimantan Tengah (1 sekolah), Kalimantan Timur (4 sekolah), Kepulauan Riau (1 sekolah), Lampung (1 sekolah), Maluku (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (1 sekolah), Nusa Tenggara Timur (1 sekolah), Papua (3 sekolah), Papua Barat (1 sekolah), Sulawesi Selatan (3 sekolah), Sulawesi Utara (1 sekolah), Sumatera Barat (9 sekolah), dan Sumatera Utara (1 sekolah).

Penerima manfaat program pelatihan guru Makmal Pendidikan dari tahun 2004 sampai 2012 adalah 12.835 orang guru yang tersebar di 23 provinsi yaitu Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. []



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA



## DUA MUKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA



Program pendidikan buah kebijakan pemerintah banyak yang berupa bantuan langsung, misalnya Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Siswa Miskin, dan program Ruang Kelas Baru. Dari sisi tenaga pendidik, kesejahteraan guru juga mendapat angin segar dengan adanya tunjangan sertifikasi.

Program-program tersebut memang perlu diapresiasi telah memberikan sumbangsih bagi kemajuan pendidikan masyarakat dan dunia pendidikan. Sayangnya, program-program itu bersifat *hit and run* dan tidak menjamin kontinuitas. Program-program itu juga masih mengedepankan besaran kuantitas sebagai ukuran keberhasilan. Misalnya, banyaknya siswa yang memperoleh beasiswa, banyaknya sekolah yang mendapat bantuan operasional, atau banyaknya guru yang memperoleh tunjangan profesi.

Dua muka kebijakan pendidikan Indonesia! Frase ini tidaklah berlebihan untuk menyebut kesadaran dan kepedulian pemangku kebijakan dalam upaya meningkatkan taraf pendidikan di satu sisi, namun di sisi lain kesenjangan dan ketidakadilan dalam dunia pendidikan yang begitu kasat mata seolah tidak dipedulikan. Kualitas riil pendidikan di negara kita amatlah paradoks dengan prestasi yang diraih sebagian siswa dalam ajang olimpiade sains di kancah internasional.

Bila di kota-kota besar siswa sudah begitu piawai dengan bahasa asing, di pelosok negeri masih amat banyak siswa dan guru yang kesulitan melafalkan bahasa Indonesia. Bila di kota-kota besar, kerapian dan keelokan seragam sudah jadi niscaya, di banyak daerah beribu siswa tidak sempat memikirkan busana apa yang melekat di badan. Bahkan, ketika teman mereka di kota besar begitu riang memasuki bangku kelas ber-AC, teman mereka di beranda negeri masih bingung dengan seringnya lampu di rumah padam saat belajar.

Buku yang ada di tangan Anda ini, tidak sekadar mengulas kebijakan pendidikan, tapi juga menoleh kenyataan di lapangan sebenarnya. Sebagai sebuah lembaga yang berpengalaman langsung dalam penempatan guru model di pelbagai pelosok negeri, kiranya kajian dalam buku ini tidak semata berupa gerundelan atas praktik pendidikan tapi juga saran dan refleksi untuk membenahi dunia pendidikan kita. []

